BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Kerja Praktek

Menurut Syafiee (2000) Secara substansial, terdapat tiga lingkup pemerintahan dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia yaitu pemerintahan pusat, pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota. Pemerintahan yang lebih luas cakupannya memberi arahan pada pemerintahan yang cakupannya lebih sempit. Menurut Abdul Karim, (2014) Pemerintahan Provinsi Jawa Barat adalah salah satu pemerintahan yang berada dibawah naungan pemerintah pusat. Pemerintahan Provinsi Jawa Barat memiliki tujuan yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat, sehubungan dengan itu Pemerintahan Provinsi Jawa Barat berupaya untuk mewujudkan keseimbangan fiskal dengan mempertahankan kemampuan keuangan daerah yang bersumber dari pendapatan pajak dan sumber-sumber lainnya guna memenuhi keinginan masyarakat. Salah satu ciri yang penting dalam mewujudkan keseimbangan tersebut adalah berlangsungnya proses penyediaan anggaran kepentingan dan kebutuhan di masyarakat.

Kebijakan belanja daerah diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, dengan berprinsip pada *pro growth, pro poor, pro job, pro environment, pro public*, melalui alokasi anggaran untuk 20% pendidikan, peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan serta penggunaan indeks relevansi anggaran dalam penentuan anggaran belanja,

penganggaran untuk mitigasi serta kebencanaan dan kerjasama antar daerah. (Mahmudi, Manajemen Keuangan Daerah. 2009)

Menurut Abdul Halim (2007:52) dalam bukunya yang berjudul Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah, Buku Kas Umum adalah *cash book* yaitu buku yang digunakan untuk mencatat setiap penerimaan / pendapatan, pengeluaran, baik secara tunai maupun melalui akun perusahaan swasta maupun pemerintahan. Bentuknya sederhana setidaknya terdiri dari keterengan, debit, kredit dan saldo. Kolom keterangan untuk mencatat penjelasan tentang suatu transaksi. Jumlah penerimaan uang dicatat dalam kolom debet atau kas masuk sedangkan jumlah pengeluaran dicatat di kolom kredit atau kas keluar. Sisa kas dicatat pada kolom saldo kas. Meski bentuknya sederhana, buku kas memiliki fungsi vital dalam pengelolaan keuangan, namun banyak yang mengabaikan penggunaan buku kas. Mereka menganggap proses pencatatan buku kas terlalu birokrasi, hanya menjadi beban administrasi yang tidak perlu. Menurut Mark Aditya, Buku kas ini menjadi salah satu informasi yang penting dalam sebuah instansi terutama dipemerintahan. Informasi yang diberikan pun harus memenuhi karakteristik agar informasi yang diberikan lebih akurat dan berkualitas diantaranya di dalam penyajiannya harus jujur agar akuntabel dalam penyajiannya.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengetahui dan menulis masalah tersebut ke dalam bentuk Laporan Kerja Praktek dengan judul :

“ Prosedur Pencatatan Buku Kas Umum di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat”

1.2 Maksud dan Tujuan Kerja Praktek

1.2.1. Maksud Kerja Praktek

Maksud penulis melaksanakan kerja praktek di Bagian Akuntansi adalah untuk memperoleh data tentang Prosedur Buku Kas Umum pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat.

1.2.2. Tujuan Kerja Praktek

Dalam prosedur peninjauan Buku Kas Umum di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat harus sesuai dengan ketentuan sesuai dengan undang undang yang berlaku saai ini, maka tujuan penulis dalam melaksanakan kerja praktek di Bagian Akuntansi dan Pelaporan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yaitu :

a. Agar mampu memahami tentang Prosedur dalam pencatatan Buku Kas Umum
b. Agar mampu membuat pelaporan Buku Kas Umum yang akuntabel.

1.3 Kegunaan Kerja Praktek

Adapun kegunaan yang diharapkan penulis dengan dilaksanakannya kuliah kerja praktek di Bagian Akuntansi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat yaitu :

a. Bagi Penulis

Selama penulis melaksanakan kerja praktek di Bagian Akuntansi Pemerintahan Provinsi Jawa Barat khususnya pada Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintahan Provinsi Jawa Barat, penulis jadi lebih mengetahui tentang prosedur pencatatan Buku Kas Umum dalam membedakan pencatatan kas masuk dan kas keluar.

b. Bagi Instansi

Dalam pelaksanaan kerja praktek penulis membantu dalam pencatatan Buku Kas Umum di Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintahan Provinsi Jawa Barat, Sehingga dapat membantu dalam penyelesaian pencatatan Buku Kas Umum tepat pada waktu yang sudah ditentukan.

c. Bagi Pihak Lain.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi masyarakat umum yang membutuhkan informasi mengenai Proosedur Pencatatan Buku Kas Umum pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa barat.

1.4 Metode Kuliah Kerja Praktek

Metode yang digunakan oleh penulis adalah *Block Release* yaitu pelaksanaan kuliah praktek kerja yang dilaksanakan dalam satu periode tertentu yaitu selama satu bulan, yaitu tanggal 15 Agustus sampai dengan 15 September 2014 selama 25 hari kerja.

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis lakukan meliputi sebagai berikut :

1. Studi lapangan

a. Pengamatan Langsung (*Observation*)

Pengamatan langsung yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan mengamati dan meninjau secara langsung prosedur peninjauan Buku Kas Umum khususnya di Bagian Akuntansi.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara langsung dengan staf di Bagian Akuntansi dan Pelaporan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat dan pihak-pihak yang berhubungan dengan pihak pengelola data peninjauan Buku Kas Umum dari Dinas Komunikasi dan Informatika untuk dibuat pelaporan secara global.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mengadakan pencatatan dan pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan prosedur Peninjauan Buku Kas Umum, misalnya data surat perintah pencairan dana (SP2D) di Dinas Komunkasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat.

1.5 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek

Dalam pelaksanaan penyusunan laporan realisasi anggaran Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat saya selaku Penulis melakukan penelitian dengan terjun langsung ke instansi yang akan dituju untuk melaksanakan kerja praktek di Pemerintahan Provinsi Jawa Barat khususnya di Bagian Akuntasi. Adapun rincian dari lokasi dan waktu kerja praktek, yaitu :

A. Lokasi kerja praktek

Penulis mendapatkan data Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat beserta dengan pengarsipan dokumen di Bagian Akuntansi yang berada di Jalan Tamansari No. 55 Bandung Tlp. (022) 2502898.

B. Waktu kerja praktek

Waktu pelaksanaan kuliah kerja praktek yaitu selama satu bulan dimulai dari tanggal 15 Agustus sampai dengan 15 September 2014. Adapun rincian waktu pelaksanaan kegiatan yang terdapat pada tabel 1.1.

Tabel 1.1

No	Aktivitas	Hari	Waktu
1	Kerja Praktek	Senin – Jum'at	07.30 – 16.00 WIB
2	Istirahat	-	12.00 – 13.00 WIB
3	Libur	Sabtu - Minggu	-